

Kepada Yth:

Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi

Dengan Hormat,

Mempertimbangkan apa yang terjadi saat ini berkenaan dengan pengajuan gugatan hasil Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh paslon 01 dan 03. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luckfi Nurcholis

No KTP : 210110060773001

Alamat : Cibubur Country, Gunung Putri, Kabupaten Bogor

Pekerjaan : Wiraswasta

Memohon kepada Yang Mulia para Hakim MK, untuk mengajukan diri sebagai Amicus Curiae. Saya adalah rakyat biasa yang tidak memiliki kepentingan apapun, hanya prihatin atas situasi yang terjadi saat ini sebagai akibat ulah segelintir elit yang melihat proses demokrasi di Indonesia. Sebagai rakyat kebanyakan pada umumnya kami tidak peduli dengan apa yang terjadi di Tingkat elit, hanya perlu diketahui bahwa buat kami pesta demokrasi sudah selesai. Keberanian saya mengajukan diri sebagai amicus curiae dipicu oleh munculnya para elit yang memiliki kepentingan kekuasaan untuk membela paslon yang didukungnya menadi amicus curiae. Meskipun saya hanya rakyat biasa, tetapi saya selalu terlibat secara sukarela dalam proses demokrasi di Indonesia, hal ini dimulai Ketika secara sukarela saya menjadi anggota KPPS di TPS tempat saya tinggal sejak pemili 2019, hingga akhirnya diusulkan kembali oleh warga untuk menjadi anggota KPPS di TPS 30 Kelurahan Cikeas Udik di pemilu tahun 2024 ini. Jadi keterlibatan saya sejak 2019 sebagai petugas TPS saya piker cukup valid untuk dipertimbangkan menjadi amicus curiae.

Melihat sidang MK yang terbuka secara nasional, saya sebagai petugas lapangan sungguh sangat prihatin dan sedih secara mendalam. Kerja keras kami sedikitpun tidak dihargai, Yang Mulia para hakim, perlu diketahui bahwa tugas kami sebagai petugas lapangan pada hari H pemilihan adalah 24 jam kerja non-stop bahkan ada yang lebih, kami petugas ditengah guyuran hujan mulai bekerja dari jam 5.30 pagi hingga 5.30 pagi di hari berikutnya. Bisa Yang Mulia bayangkan bagaimana lelahnya kami, itupun tidak dihitung dengan persiapan selama beberapa minggu sebelumnya. Sebagai tenaga sukarela sejak tahun 2019 sebagai petugas TPS, saya merasakan ada perbaikan yang telah dilakukan oleh KPU, dari mulai system, SOP, aturan yang jelas dan sosialisasi, bahkan ada peningkatan honor yang jika dihitung dari jumlah jam kerja yang tanpa henti itu sama sekali tidak ada nilainya.

Yang ingin saya sampaikan disini adalah tuduhan kecurangan oleh paslon tertentu terhadap hasil demokrasi sungguh menyakitkan kami, apalagi di persidangan penggugat tidak bisa membuktikan secara akuran bentuk kecurangannya. Bagi kami rakyat kecil, sidang berubah menjadi dagelan politik untuk menunjukkan ego kekuasaan kelompok dengan mengabaikan mayoritas suara, bahkan melebar kemana-mana, sangat disayangkan bahwa elit dengan ambisi kekuasaanya justru malah melebar menjadi serangan personal kepada Kepala Negara yang sah di NKRI ini. Kehadiran para mentri, menunjukkan bahwa pemerintah menghormati MK bahkan

suara yang disampaikan tidak ada upaya menutupi. Bagi kami rakyat kecil itu sudah cukup menunjukkan bahwa rezim saat ini memang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Tuduhan pilihan paslon capres dan wapres dikarenakan bantuan sosial yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, sebetulnya semakin menunjukkan bahwa elit politik sangat tidak menghargai kami rakyat kecil. Elit mengira suara kami bisa dibeli oleh paket bansos yang tidak seberapa. Itu sungguh kesalahan fatal bagaimana elit mempermainkan perasaan kami. semoga Yang Mulia berkenan melihat hasil penelitian oleh litbang KOMPAS sebagai media yang dianggap netral, bahwa ternyata tidak ada hubungan antara Bansos dan pilihan paslon (<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/04/04/ahli-sebut-kemenangan-prabowo-gibran-bukan-karena-bansos-dan-faktor-jokowi>), bahkan dituliskan yang sama approval rating presiden Jokowi tidak berpengaruh terhadap preferensi pilihan. Sebagai wiraswasta saya sering berkeliling hampir seluruh Indonesia, bahkan yang terbaru saya pergi ke tempat yang sering disebut sebagai kendang banteng, menariknya pilihan mereka memang tidak pada paslon penggugat, meskipun pilihan partai tetap sesuai dengan kandangnya. Hal ini diperkuat dalam tulisan Litbang Kompas tanggal 15 April 2024 di Kompas cetak menunjukkan bahwa para pemilih partai tidak otomatis memilih paslon yang didukungnya (Menilik Andil Parpol ke Prabowo-Gibran, Vincentius Gitiyarko/Litbang Kompas). Bahkan ada partai yang mendukung paslon 03, bahkan mayoritas memilih paslon 02. Justru saya sebagai rakyat kecil membaca ini sebagai kedewasaan dan kecerdasan rakyat Indonesia dalam berdemokrasi. Bukankah ada istilah dalam melawan politik uang bahwa ambil uangnya jangan pilih orangnya? Disinilah saya pikir para elit gagal memahami karakteristik dan kultur Masyarakat. Harusnya kalau berbicara kecurangan tidak hanya masalah pilpres tetapi juga pemilu legislatif, disini kami sebagai rakyat bahwa gugatan cukup adil, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, menunjukkan betapa berambisinya mereka terhadap kekuasaan.

Pemilu itu ibarat menjual produk, jika ahli marketing gagal menjual produknya, itu karena kesalahan strategi, hal ini justru diabaikan oleh para elit, mereka percaya akan trah, hubungan biologis dan edeologis yang nota bene tidak berpengaruh besar terhadap preferensi pemilih. Dalam kultur Masyarakat Indonesia, produk yang menyerang produk lain dan lebih parahnya produk yang tidak bersaing akan ditinggalkan oleh konsumen, begitu kira-kira yang terjadi dengan paslon 01 dan 03. Terutama dalam hal ini paslon 03, telah gagal memosisikan sebagai produk yang netral dengan tidak menyerang petahana yang jelas-jelas tidak ikut dalam kompetisi. Kembali saya meminta pertimbangan kepada Yang Mulia bahwa apa yang saya sampaikan adalah pemikiran dari hasil melihat dan merasakan sesama rakyat biasa. Ketakutan kami yang terbesar adalah mengabaikan suara rakyat mayoritas yang hingga saat ini cenderung diam. Bagi kami pemilu sudah selesai kami harus melanjutkan hidup dengan tidak lagi ada hingar binger, sebagai keluarga besar dengan 13 bersaudara, kami memiliki pilihan yang berbeda-beda, tetapi ketika pesta demokrasi selesai, maka tidak ada lagi bagi kami pendukung 01, 02 dan 03. Hal ini juga tercermin di dalam lingkungan Masyarakat juga, hanya para elit yang masih belum legowo. Semoga Yang Mulia para hakim bisa mempertimbangan dengan bijaksana demi keutuhan NKRI.

Sebagai akhir kata saya mengutip peribahasa lama bahwa “Air Beriak Tanda Tak Dalam”; “Tong Kosong Nyaring Bunyinya” sebagai arti bahwa orang yang berteriak paling kencang biasanya tidak berbahaya. Tetapi peribahasa lain mengatakan “Air Tenang Menghanyutkan.”, ini mengibaratkan bahwa yang terlihat diam sebetulnya sangat berbahaya.

Semoga Yang Mulia para Hakim MK yang saya hormati bisa mempertimbangkan permohonan saya ini. Terimakasih

Cibubur, 19 April 2024

Luckfi Nurcholis

HP. 081818111011

Terlampir KTP

